



Laporan Kajian Regional Diagnostic Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Barat

International Center for Applied Finance and Economics
IPB University

Glosarium

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku	NasDem	Partai Nasional Demokrat
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	NTT	Nusa Tenggara Timur
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	OPD	Organisasi Perangkat Daerah
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia	PAD	Pendapatan Asli Daerah
ARIMA	<i>Autoregressive Integrated Moving Average</i>	PDB	Produk Domestik Bruto
ASN	Aparatur Sipil Negara	PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
ASITA	Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
BAPENDA	Badan Pendapatan Daerah	PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PAN	Partai Amanat Nasional
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	PPJ	Pajak Penerangan Jalan
BPOLBF	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	PSN	Proyek Strategis Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik	RDP	Rapat Dengar Pendapat
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
CEIC	<i>China Economic Information Center</i>	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>	RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
DAK	Dana Alokasi Khusus	RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
DLQ	<i>Dynamic Location Quotient</i>	SETDA	Sekretariat Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas	SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	SMA	Sekolah Menengah Atas
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	SMI	Sarana Multi Infrastruktur (PT)
GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional	SMP	Sekolah Menengah Pertama
GOLKAR	Partai Golongan Karya	SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
IDI	<i>In-Depth Interview</i>	SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
IKA	Indeks Kualitas Air	SPM	Standar Pelayanan Minimum
IKFD	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
InterCAFE	<i>International Center for Applied Finance and Economics</i>	TPA	Tempat Pembuangan Akhir
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
KPR	Kredit Pemilikan Rumah	TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
LQ	<i>Location Quotient</i>	TPST 3R	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu – <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
MBLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	UPT	Unit Pelaksana Teknis
MULTIPOL	<i>Multi-Criteria Policy Analysis</i>	VGF	<i>Viability Gap Fund</i>
MUSRENBANG	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		

Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu wilayah strategis nasional dengan posisi sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo. Status ini memberikan peluang besar dalam pengembangan sektor pariwisata, konektivitas, dan infrastruktur dasar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat juga bergantung pada sektor konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan; transportasi; informasi dan komunikasi; serta *real estate*, yang menunjukkan perkembangan signifikan sebagai dampak dari masifnya investasi wisata dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Di sisi lain, tantangan pembangunan yang dihadapi masih cukup besar dan memerlukan penanganan dan intervensi kebijakan: (1) Geografi dan ketimpangan spasial. Daerah berbukit dan terpencar menyebabkan akses antar wilayah tidak merata. Ketimpangan pembangunan antara Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo sebagai pusat pariwisata dan desa-desa terpencil masih besar. Selain itu risiko bencana seperti longsor, banjir bandang, dan degradasi lingkungan cenderung tinggi; (2) Ketergantungan tinggi pada pariwisata dengan diversifikasi ekonomi yang terbatas. Ekonomi daerah sangat bergantung pada pariwisata yang rentan guncangan (pandemi, krisis global) sedangkan diversifikasi ekonomi, pertanian, perikanan, dan UMKM belum optimal. Sektor pertanian dan perikanan meskipun menjadi sektor dengan PDRB terbesar namun nilai tambahnya relatif rendah yang disebabkan oleh keterbatasan akses jalan desa, minimnya fasilitas pasca panen, belum tersedianya *cold chain*, dan rendahnya industrialisasi lokal; (3) Tekanan pada infrastruktur dasar akibat pertumbuhan wisata. Pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan wisatawan membuat kapasitas infrastruktur dasar seperti jalan, air minum, persampahan, sanitasi, dan sebagainya belum mencukupi; (4) Keterbatasan fiskal daerah akibat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ke daerah, dan; (5) Kualitas SDM yang masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata modern.

Kajian ini dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) bekerja sama dengan INTERCAFE IPB menggunakan pendekatan *mixed methods* yang meliputi tiga tahap: (1) analisis kuantitatif melalui metode statistik dan telaah kualitatif terhadap dokumen strategis daerah seperti RPJMD, RTRW, dan APBD; (2) pengambilan data kualitatif melalui *In-Depth-Interview*; serta (3) validasi lapangan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, akademisi, asosiasi, *regional expert*, dan perwakilan Kementerian Keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data, sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi juga mempertimbangkan kelayakan politik dan fiskal.

Struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang sekitar 37,8 persen PDRB pada 2024. Komoditas utamanya meliputi padi, jagung, dan singkong. Namun, dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor ini terus menurun setiap tahun. Artinya, meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor basis, namun tidak lagi prospektif sebagai motor pertumbuhan ke depan, karena

pertumbuhannya tertinggal dibandingkan sektor lain. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sektor pendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terkonsentrasi pada sektor pariwisata, sementara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perikanan masih tergolong non-progresif atau lamban perkembangannya. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata memiliki risiko kerentanan ekonomi ketika terjadi guncangan eksternal, seperti pandemi COVID-19 tahun 2019 yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

Akses infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat pada dasarnya telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama di kawasan perkotaan Labuan Bajo yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Seiring dengan perkembangan tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian:

1. Kesenjangan wilayah. Desa-desa terpencil dan wilayah pegunungan masih menghadapi keterbatasan jaringan air minum, debit air yang menurun pada musim kemarau, serta akses sanitasi yang tidak merata. Akses rumah tangga terhadap air minum layak belum merata, dan kualitas air relatif rendah (IKA 51,69 kategori “kurang”). Meski secara agregat daya dukung air masih surplus (indeks 2,13), lima kecamatan; Mbeliling, Kuwus, Ndosso, Kuwus Barat, dan Pacar sudah melewati ambang batas akibat tekanan penduduk, alih fungsi lahan, dan distribusi air yang tidak merata.
2. Tekanan kapasitas pengelolaan sampah. Lonjakan wisatawan meningkatkan timbunan sampah domestik dan komersial. Kapasitas TPA yang ada hampir mencapai batas tampung, sementara sebagian besar desa belum memiliki fasilitas TPST atau sistem pengolahan sampah terpadu. Modernisasi TPA, peningkatan TPST desa, dan skema penanganan sampah berbasis kawasan menjadi kebutuhan yang mendesak.
3. Konektivitas antar wilayah dan beban lalu lintas. Kualitas jaringan jalan utama menuju Labuan Bajo terus membaik, namun jalan penghubung desa dan akses antar kecamatan masih banyak yang rusak atau tidak mantap. Pertumbuhan kendaraan wisata (mobil penumpang, *shuttle*, kapal wisata, logistik) meningkat signifikan dan menimbulkan tekanan pada jalan yang pertumbuhannya tidak sebanding atau relatif stagnan. Ketersediaan jalan mantap terbukti berasosiasi kuat dengan peningkatan akses ke pasar, penurunan TPT, dan penguatan rantai nilai pertanian–perikanan.
4. Infrastruktur sosial yang stagnan. Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga tidak diikuti oleh ekspansi fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, atau rumah sakit. Hal ini berpotensi menimbulkan *bottleneck* layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota. Sementara itu, tekanan wisatawan terhadap fasilitas kesehatan di Labuan Bajo meningkatkan kebutuhan modernisasi RSUD dan penambahan layanan kesehatan primer.

Secara politik, Manggarai Barat memiliki stabilitas yang tinggi. Bupati petahana merupakan figur yang kembali terpilih dan memiliki latar belakang sebagai Ketua DPRD. Pada Pemilu 2024, partai pengusung kepala daerah menguasai 60 persen kursi DPRD, meningkat signifikan dari 33 persen pada 2019, menciptakan keselarasan yang kuat antara eksekutif dan legislatif serta

mempermudah proses perumusan kebijakan strategis daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD juga terlihat dalam pengawasan serta persetujuan pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan RSUD, SPAM, pasar, dan proyek infrastruktur kunci lainnya.

Dari sisi tata kelola, Manggarai Barat terus memperkuat proses perencanaan pembangunan melalui evaluasi triwulanan oleh DPRD, Musrenbang, serta pengawasan publik melalui media sosial. Meskipun harmonis, hubungan lembaga eksekutif–legislatif menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan retribusi daerah.

Kajian ini mengidentifikasi lima kebijakan prioritas yang diturunkan secara lebih konkret ke dalam infrastruktur prioritas dan program prioritas sebagai berikut:

1. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas.** Difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas antar kecamatan dan antar pulau. Infrastruktur berkualitas juga menjadi prasyarat dalam mendorong investasi swasta dan pelayanan publik yang merata.
2. **Transformasi Pertanian dan Perikanan Maju.** Diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta program pertanian dan perikanan yang lebih produktif, modern, dan berorientasi pasar. Kebijakan ini mencakup penguatan rantai nilai hasil pertanian dan perikanan, penyediaan sarana prasarana produksi, pengolahan pascapanen, serta integrasi dengan sektor pariwisata melalui konsep *agro tourism* dan *eco-fisheries*.
3. **Peningkatan Kualitas SDM Unggul dan Kompetitif.** Berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan, penguatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata, pertanian, dan jasa. Kebijakan ini bertujuan mencetak SDM lokal yang mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta mengurangi ketimpangan kualitas hidup antarwilayah.
4. **Penguatan Daya Saing Pariwisata Unggul.** Diarahkan pada optimalisasi potensi Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dengan memperkuat infrastruktur pendukung, layanan pariwisata berbasis masyarakat, promosi digital, dan pengembangan destinasi alternatif di luar Labuan Bajo. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan wisata dan menciptakan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
5. **Reformasi Birokrasi yang Proporsional dan Profesional** - Difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui digitalisasi, transparansi tata kelola, dan penguatan sistem pengawasan. Reformasi birokrasi ditujukan untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kredibilitas pemerintahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.

I. Latar Belakang, Tujuan, dan Metodologi Penelitian

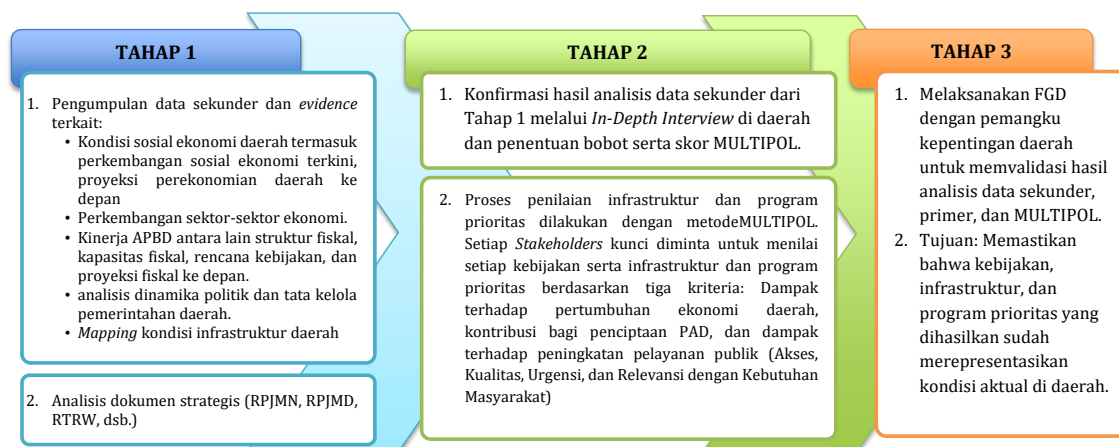
Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut studi *World Bank* (Estache, 2007), proyek infrastruktur menghasilkan *social economic rate of return* antara 30–80 persen, bergantung pada jenisnya, dan angka ini melampaui sebagian besar tingkat pengembalian investasi lainnya. Di Indonesia, sektor infrastruktur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 10,18 persen. Namun, ketimpangan infrastruktur antar wilayah masih menjadi tantangan besar. Perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di berbagai daerah menyebabkan disparitas dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berdampak pada ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada karakteristik lokal. Salah satu pendekatan tersebut adalah *Regional Diagnostic*, yaitu proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu daerah. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara lebih kontekstual, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

Dalam rangka tersebut, pada tahun 2025, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan INTERCAFE IPB melaksanakan kajian *Regional Diagnostic* Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan strategis berbasis data di bidang infrastruktur melalui pemetaan potensi, tantangan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing daerah. Analisis tersebut digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, proyek infrastruktur, dan program prioritas yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (*no one size fits all*). Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah, PT SMI, dan pemangku kepentingan lain yang relevan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta pengembangan proyek infrastruktur strategis dengan konteks daerah dan mendukung implementasi pembiayaan publik secara lebih efektif.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif yang dilaksanakan dalam tiga tahap (Gambar 1). Tahap pertama mencakup analisis data sekunder dan dokumen strategis daerah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai metode analisis digunakan, seperti statistik deskriptif, analisis elastisitas, *LQ*, *DLQ*, *Shift Share*, *Infrastructure Index*, *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*, dan *Panel Logistic Regression* serta telaah terhadap dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, APBD dan RTRW. Tahap kedua pengumpulan data primer melalui *In-Depth Interview* (IDI) dengan pemangku kepentingan daerah untuk mengonfirmasi dan memperdalam temuan tahap pertama. Beberapa lembaga yang menjadi narasumber IDI adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Sekretariat Daerah (Setda); Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD); Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; BUMD Perumda Air Minum Wae Mbeliling; Komisi III DPRD, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem); dan Perwakilan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (*Regional Chief Economist* dan *Local Expert* DJPb Kemenkeu). Wawancara ini menghasilkan daftar kebijakan, program, dan infrastruktur yang relevan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik daerah. Pada tahap ini, responden juga diminta menilai prioritas setiap kebijakan, program, dan infrastruktur menggunakan metode analisis *multi criteria policy* (MULTIPOL), berdasarkan tiga kriteria utama: peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), peningkatan PAD, dan pemenuhan layanan dasar publik. Tahap ketiga adalah *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan wilayah yaitu Bappeda; Setda; Bapenda (Badan Pendapatan Daerah); Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan; BUMD Perumda Air Minum Wae Mbeliling; Perwakilan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (*Regional Chief Economist* dan *Local Expert* DJPb Kemenkeu), serta perwakilan asosiasi seperti ASITA, APINDO, dan GAPENSI. FGD ini bertujuan memvalidasi hasil analisis secara komprehensif agar kebijakan, program, dan infrastruktur prioritas yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kondisi aktual daerah.



Gambar 1. Alur dan Keterkaitan Metode Kajian

II. Kondisi Ekonomi dan Fiskal Daerah

Kondisi Ekonomi dan Sektor Unggulan

Struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang sekitar 37,8 persen PDRB pada 2024 (Tabel 1). Komoditas utamanya meliputi padi, jagung, dan singkong. Namun, dalam lima tahun terakhir kontribusi sektor ini terus menurun setiap tahun. Artinya, meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor basis, namun tidak lagi prospektif sebagai motor pertumbuhan ke depan, karena pertumbuhannya tertinggal dibandingkan sektor lain.

Di sisi lain perkembangan pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat ditopang oleh sektor konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan; serta *real estate* yang mencerminkan karakter wilayah yang bertumpu pada pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Posisi Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian daerah. Dampaknya adalah pertumbuhan investasi hotel, *resort*, serta properti komersial yang terus meningkat dan menjadi salah satu faktor yang memacu pertumbuhan sektor *real estate* dan konstruksi dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas pariwisata yang semakin berkembang menciptakan tingginya permintaan jasa akomodasi, makanan, minuman, serta layanan pendukung lainnya, sehingga sektor ini berperan sebagai lokomotif PDRB Manggarai Barat.

Di luar sektor pariwisata, Manggarai Barat memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan, meskipun kontribusi pertumbuhannya belum sebesar sektor jasa. Komoditas pertanian dan perikanan masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan, tetapi produktivitas dan nilai tambahnya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung. Di sektor pertambangan, Manggarai Barat memiliki potensi mineral mangan yang telah teridentifikasi di berbagai lokasi, termasuk Desa Bajak, Robek, dan Wangkung, serta adanya catatan eksplorasi emas oleh PT Aneka Tambang. Namun pengembangan sektor ini masih terkendala aktivitas pertambangan ilegal dan persoalan perizinan yang belum tertata baik.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto ADHB (Miliar Rp) Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.423,04	1.447,54	1.480,91	1.585,76	1.672,82	1.736,01
B. Pertambangan dan Penggalian	60,53	64,20	66,73	70,72	77,20	80,72
C. Industri Pengolahan	15,60	15,85	15,10	16,31	20,32	24,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	1,67	1,96	2,24	2,56	3,31
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	450,54	483,62	529,04	579,57	660,59	707,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	344,00	337,96	366,61	407,42	468,37	520,82
H. Transportasi dan Pergudangan	159,90	120,90	125,75	150,92	197,57	253,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,78	18,26	20,17	27,74	38,85	48,58
J. Informasi dan Komunikasi	227,22	254,71	264,29	274,02	285,70	297,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	20,63	20,67	20,88	21,22	22,54	23,56
L. Real Estat	104,68	102,29	105,35	115,44	131,17	150,17
M,N. Jasa Perusahaan	16,28	9,33	8,03	8,63	9,47	10,58

Kabupaten Manggarai Barat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	468,52	485,55	446,06	463,10	489,12	540,85
P. Jasa Pendidikan	104,78	112,06	110,68	109,06	118,88	129,73
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,84	40,89	46,31	47,48	55,51	62,29
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,47	3,82	3,73	3,93	4,28	4,68
Produk Domestik Regional Bruto	3.466,38	3.519,37	3.611,64	3.883,61	4.254,98	4.594,28

Sumber: BPS (2025)

Sementara itu sektor perdagangan dan transportasi juga menunjukkan kontribusi besar, terutama sebagai efek *multiplier* dari pertumbuhan pariwisata dan meningkatnya pergerakan barang maupun wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata secara langsung menaikkan permintaan jasa transportasi darat dan laut, memperkuat aktivitas perdagangan lokal, dan membuka peluang usaha baru di wilayah-wilayah sekitar Labuan Bajo. Keberadaan bandara, pelabuhan, dan akses wisata yang diperkuat melalui proyek-proyek strategis nasional semakin menunjukkan peran penting sektor-sektor tersebut dalam struktur ekonomi daerah (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Berdasarkan Hasil LQ dan DLQ Kabupaten Manggarai Barat

Kriteria	DLQ >1	DLQ <1
LQ >1	Basis dan Prospektif ● Pertambangan dan Penggalian ● Konstruksi ● <i>Real estate</i>	Basis dan Tidak Prospektif ● Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ● Jasa Perusahaan
LQ <1	Sektor Non-Basis dan Prospektif ● Industri Pengolahan ● Pengadaan Listrik dan Gas ● Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ● Transportasi dan Pergudangan ● Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ● Jasa Lainnya	Sektor Non-Basis dan Tidak Prospektif ● Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ● Informasi dan Komunikasi ● Jasa Keuangan dan Asuransi ● Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ● Jasa Pendidikan ● Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), terdapat lima sektor yang secara konsisten menjadi sektor basis atau unggulan di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2015–2024, yaitu: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) konstruksi; (4) *real estate*; dan (5) jasa perusahaan. Posisi sektor pertanian sebagai sektor basis sejalan dengan karakter Pulau Flores, di mana lebih dari 70 persen penduduk menggantungkan hidupnya pada pertanian. Komoditas seperti kemiri, kelapa, kopi, jagung, ternak sapi, serta perikanan tangkap berpotensi dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi sederhana berbasis desa. Sementara itu, konstruksi dan *real estate* tumbuh pesat seiring pengembangan Labuan Bajo sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional yang mendorong pembangunan properti residensial, hotel, dan fasilitas komersial lainnya. Sektor jasa perusahaan juga menjadi basis karena banyaknya aktivitas jasa persewaan kendaraan, biro perjalanan, dan jasa pendukung wisata yang berkembang pesat bersama industri pariwisata.

Hasil *Dynamic Location Quotient* (DLQ) mengidentifikasi sembilan sektor yang termasuk kategori prospektif atau memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor prospektif tersebut meliputi: pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; *real estate*; serta jasa lainnya. Berbeda dengan LQ yang bersifat statis, DLQ menangkap dinamika pertumbuhan sektoral dan menunjukkan arah perubahan keunggulan sektor dari waktu ke waktu.

Secara umum berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor konstruksi, *real estate*, serta pertambangan dan penggalan menjadi sektor yang tidak hanya unggul saat ini tetapi juga memiliki prospek pertumbuhan paling menjanjikan ke depan, sehingga dapat disebut sebagai sektor penggerak utama (*leading sector*) perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Pada sektor pertambangan, terdapat potensi mineral seperti mangan dan indikasi emas yang jika dikelola legal dan berkelanjutan dapat menambah sumber pertumbuhan ekonomi. Manggarai Barat juga memiliki potensi energi terbarukan, khususnya panas bumi dengan kapasitas hingga 910 MWe, yang dapat dikembangkan untuk mendukung transisi energi bersih.

Selain sektor unggulan yang telah diidentifikasi melalui analisis LQ dan DLQ, hasil *Shift Share* menunjukkan enam sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta jasa kesehatan. Keenam sektor tersebut tercatat tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing lebih baik dibanding sektor yang sama di tingkat Provinsi NTT. Sebagai catatan, analisis *Shift Share* dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sama-sama digunakan untuk menilai kinerja sektoral, namun dengan fokus yang berbeda. *Shift Share* mengukur sumber pertumbuhan ekonomi daerah apakah disebabkan oleh struktur ekonomi nasional, karakter sektoral, atau keunggulan lokal sedangkan DLQ melihat arah perubahan keunggulan sektor dari waktu ke waktu, apakah suatu sektor semakin unggul atau justru semakin kehilangan peran.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, naik dari 4,12 persen pada tahun 2022 menjadi 4,93 persen pada tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,08 persen pada tahun 2022 menjadi 3,73 persen pada tahun 2024). Perkembangan ekonomi tersebut diikuti oleh perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Proporsi penduduk miskin menurun dari 17,15 persen pada 2022 menjadi 16,74 persen pada 2024, menandakan peningkatan pendapatan masyarakat dan efektivitas program perlindungan sosial daerah. Tingkat kemiskinan di Manggarai Barat konsisten lebih rendah dari rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga membaik signifikan, turun dari 4,91 persen pada 2022 menjadi 3,47 persen pada 2024, yang mencerminkan pulihnya sektor pariwisata dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pasca pandemi. Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat dari Rp1.608,7 miliar pada 2022 menjadi Rp1.757,29 miliar pada 2024, yang menandakan penguatan kegiatan investasi, baik pada pembangunan

infrastruktur pariwisata, properti, maupun fasilitas dasar masyarakat. Produktivitas tenaga kerja naik dari Rp15,89 ribu pada 2022 menjadi Rp20,03 ribu pada 2023, namun pada 2024 turun menjadi Rp18,46 ribu (Tabel 3).

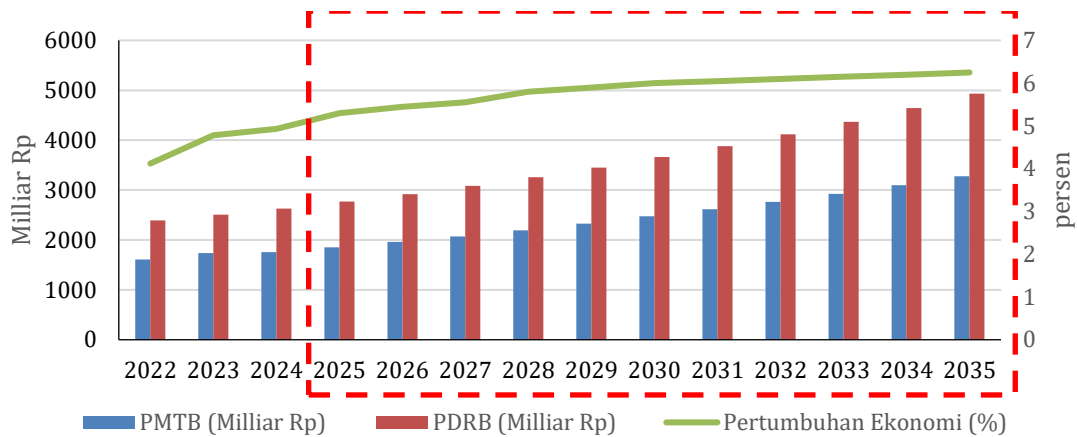
Tabel 3. Statistik Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

Indikator Ekonomi dan Sosial	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	4,12	4,78	4,93
Persentase penduduk miskin (%)	17,15	16,82	16,74
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,91	4,42	3,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB (miliar rupiah)	1.608,7	1.738,64	1.757,29
Produktivitas tenaga kerja (ribu rupiah per tenaga kerja)	15,89	20,03	18,46

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat (2025), diolah

Berdasarkan proyeksi jangka panjang dengan metode ARIMA, perekonomian Kabupaten Manggarai Barat diperkirakan terus tumbuh stabil, di mana laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat bertahap dari 5,30 persen pada 2025 menjadi 6,25 persen pada 2035, yang mencerminkan prospek ekspansi jangka panjang yang positif. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin ditopang oleh penguatan pariwisata berkelanjutan, sektor pertanian dan perikanan, perdagangan, serta pengembangan UMKM. PMTB dan PDRB juga diperkirakan terus meningkat secara konsisten sepanjang periode tersebut, sejalan dengan arah RPJMD dan prioritas pembangunan daerah.

Dari sisi investasi, PMTB terus mengalami peningkatan sejak 2022 yang bernilai Rp1.609 triliun menjadi Rp1.757 triliun pada 2024. Selanjutnya, PMTB diperkirakan tumbuh konsisten dari Rp1,854 triliun pada 2025 hingga mencapai Rp3,275 triliun pada 2035, dengan rata-rata pertumbuhan 5,82 persen per tahun. Tren ini mencerminkan adanya ekspansi investasi jangka panjang, baik melalui pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pariwisata, maupun penguatan sektor swasta terutama dalam pengembangan pariwisata, pertanian, dan perikanan. Peningkatan investasi tersebut sejalan dengan proyeksi PDRB yang menunjukkan pertumbuhan pesat. Nilai PDRB meningkat dari Rp2,391 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp2,629 triliun pada 2024, lalu diperkirakan melonjak dari Rp2,769 triliun pada 2025 hingga mencapai Rp4,932 triliun pada 2035, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88 persen per tahun. Artinya, dalam kurun waktu satu dekade PDRB Kabupaten Manggarai Barat hampir dua kali lipat. Kenaikan PDRB ini sejalan dengan strategi pembangunan daerah yang menempatkan pariwisata berkelanjutan, pertanian dan perikanan, serta perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan yang menopang struktur ekonomi daerah (Gambar 2).

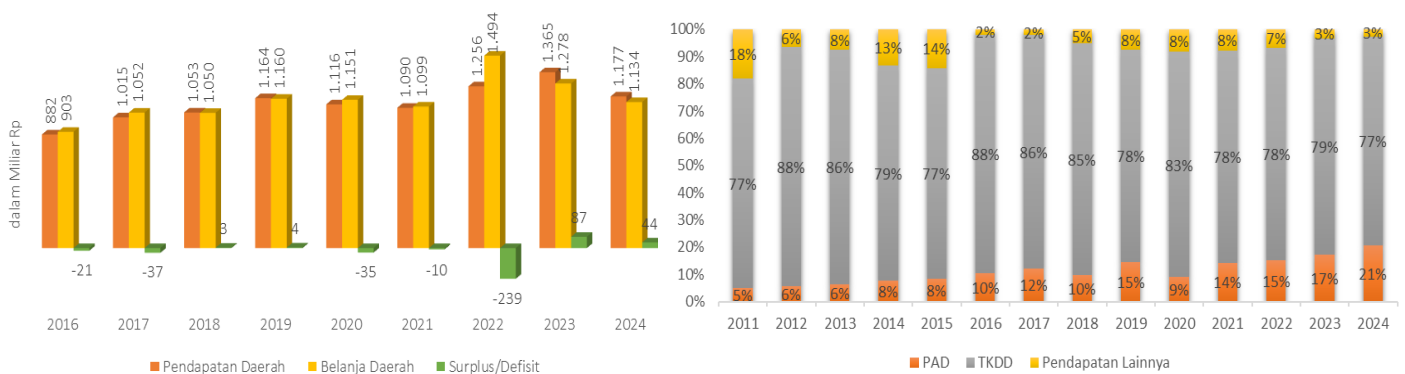


Gambar 2. Proyeksi Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat

Kondisi Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah

Struktur fiskal Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan defisit pada sebagian besar tahun selama 2016–2024. Defisit terbesar terjadi pada 2022, sedangkan surplus terbesar tercatat sebesar Rp87 miliar pada tahun 2023 dan Rp44 miliar pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya disiplin fiskal yang mulai menguat pasca 2022 (Gambar 3).

Dari sisi pendapatan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih menjadi sumber utama yang menyumbang lebih dari 75 persen dari total pendapatan setiap tahun. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas. Namun demikian, pemerintah Manggarai Barat telah melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD yang hasilnya ditunjukkan oleh peningkatan PAD dari 5 persen pada 2011 menjadi 21 persen pada 2024 (Gambar 4). Peningkatan PAD ini berpotensi memperkuat ruang fiskal dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan kebijakan transfer pusat. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Manggarai Barat masih sangat bergantung pada transfer pusat, sehingga diperlukan strategi penguatan PAD, seperti melalui optimalisasi pajak digital dan diversifikasi sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi risiko ketergantungan fiskal jangka panjang.

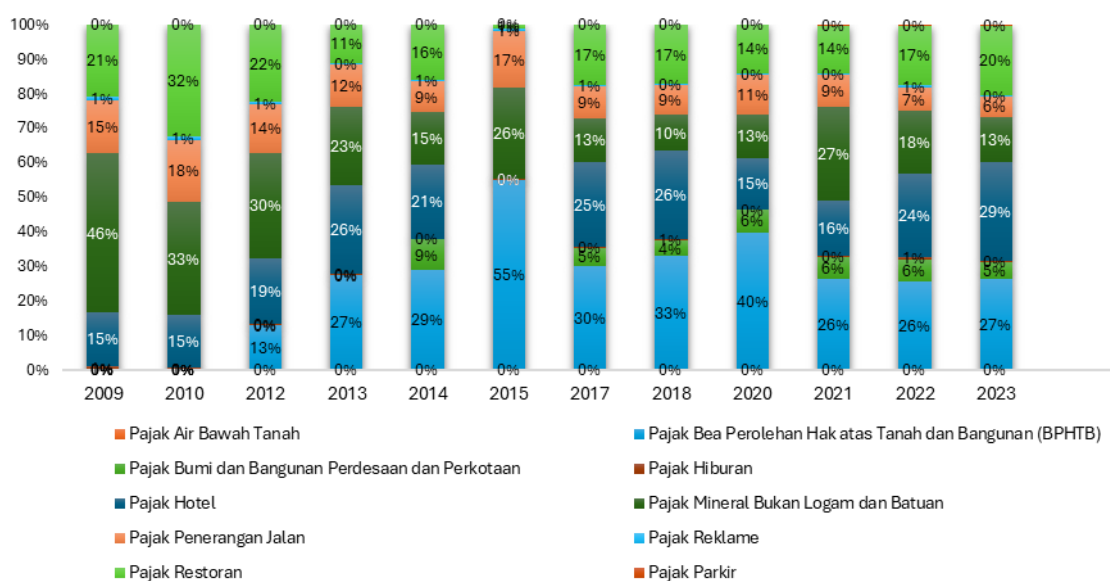


Gambar 1. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 2. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2025)

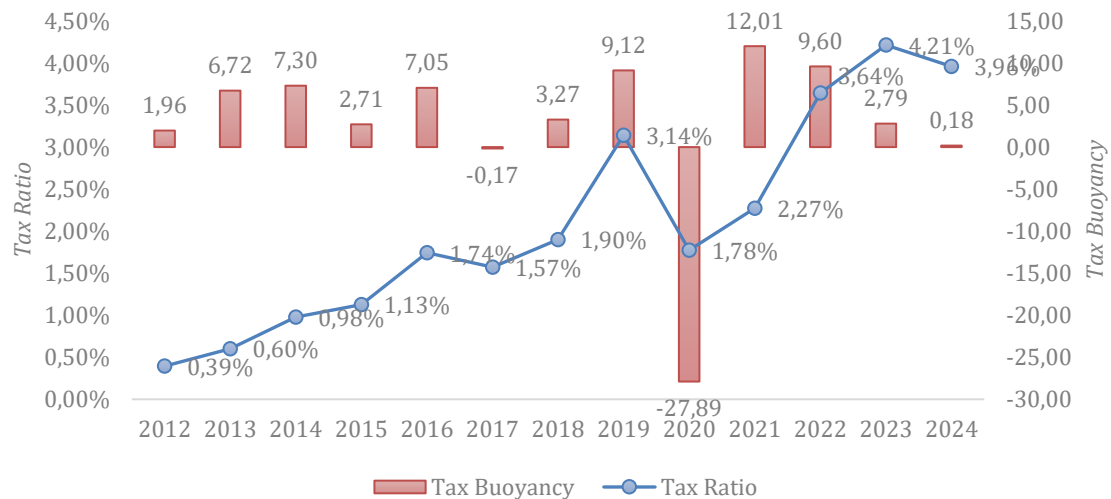
Komposisi pajak di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan struktur ekonomi dan kebijakan fiskal lokal. Pada 2009, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi komponen dominan dalam struktur pajak Kabupaten Manggarai Barat, namun kontribusinya menurun digantikan oleh dominasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Sejak tahun 2014, BPHTB dan pajak hotel menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan menjadi salah satu sumber penerimaan penting, sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi tanah dan bangunan serta pariwisata. Jenis pajak lainnya, seperti Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir, masih berada di bawah 10 persen dari total penerimaan. Dengan berkembangnya pariwisata, akses jalan, dan pusat-pusat perdagangan, pajak ini diharapkan di waktu yang akan datang dapat lebih meningkat (Gambar 5).



Gambar 5. Komposisi Realisasi Pajak di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2025)

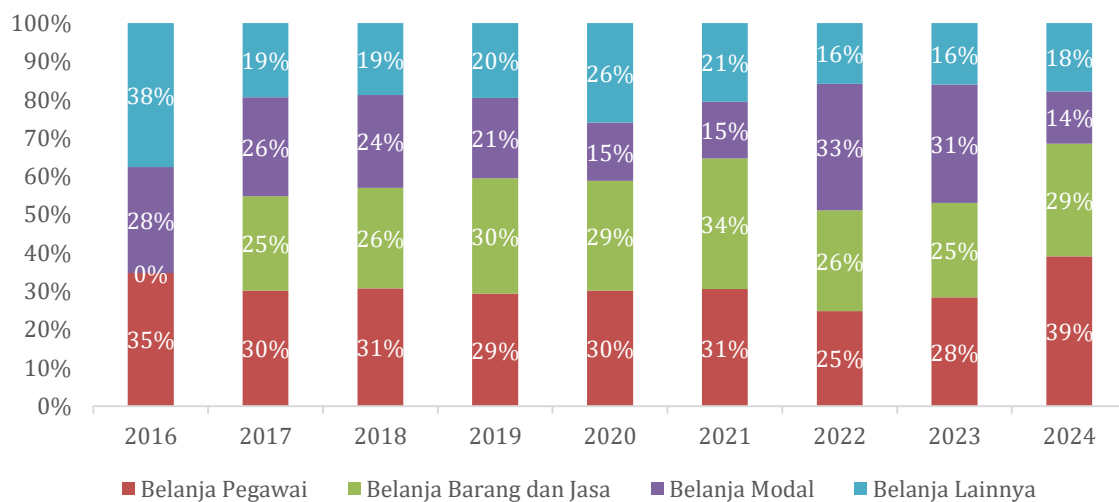
Kinerja perpajakan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama 2012–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. *Tax Ratio*, yaitu rasio antara pendapatan pajak terhadap PDRB, berada pada kisaran 0,39–4,21 persen, menandakan kontribusi pajak terhadap ekonomi daerah terus meningkat. Sementara itu, *Tax Buoyancy*, yang mengukur seberapa responsif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan fluktuasi tajam, dengan sempat menurun tajam hingga -27,89 pada 2020, namun melonjak hingga 12,01 pada 2021 seiring pemulihan pasca pandemi. Lalu angka ini cenderung berangsur menurun hingga mencapai 0,18 di tahun 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa perubahan efektivitas penerimaan pajak masih bersifat sementara dan belum struktural (Gambar 6).



Gambar 6. *Tax Ratio* dan *Tax Buoyancy* di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Kementerian Keuangan dan CEIC Database, diolah (2025)

Struktur belanja Kabupaten Manggarai Barat periode 2016–2024 didominasi oleh belanja pegawai (25-39 persen) serta belanja barang dan jasa (25-34 persen) yang menunjukkan adanya beban rutin yang cukup besar terhadap keuangan daerah serta peningkatan aktivitas operasional dan pelayanan publik. Di sisi lain, belanja modal cenderung menurun, dari 28 persen pada tahun 2016 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Pola ini memberikan gambaran bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas untuk investasi jangka panjang karena sebagian besar anggaran terserap pada belanja rutin sehingga *multiplier effect* yang dihasilkan berpotensi sangat terbatas (Gambar 7).



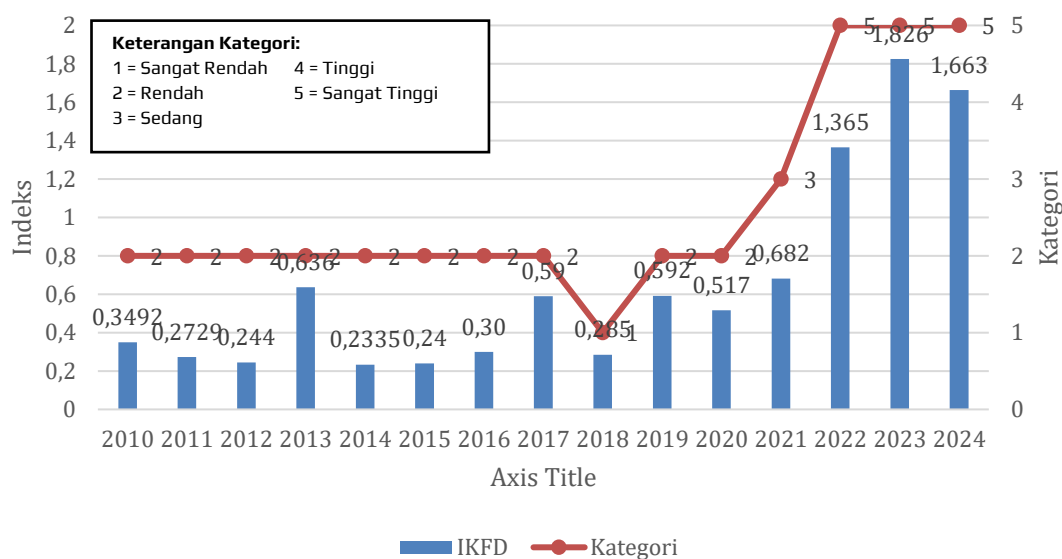
Gambar 7. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2025)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 0,285 pada 2018 menjadi 1,663 pada 2024, yang mencerminkan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan publik secara mandiri. IKFD, yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan menjadi

acuan penting dalam berbagai kebijakan fiskal yang mulai dari penentuan dana pendamping, subsidi bunga pinjaman, hingga alokasi transfer pusat dan pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan peningkatan IKFD sangat penting untuk memperkuat posisi fiskal daerah dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan.

Selama 2022-2024, IKFD Manggarai Barat umumnya berada pada dalam kategori “Sangat Tinggi”, walaupun sebelum 2020, IKFD Manggarai Barat masih berada dalam kategori “Rendah”. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal, baik melalui penguatan PAD, optimalisasi transfer pusat, maupun pengelolaan belanja yang lebih efektif. Namun demikian, fluktuasi pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Manggarai Barat masih rentan terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional (Gambar 8).



Gambar 8. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan utama, arah kebijakan fiskal Kabupaten Manggarai Barat mencakup tiga agenda besar, yaitu (1) penguatan pendapatan asli daerah (PAD), (2) penataan struktur belanja, dan (3) optimalisasi ruang fiskal dan pembiayaan pembangunan. Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta penggalan pajak kendaraan bermotor di atas air (lebih dari 700 unit kapal wisata). Selain itu, pemanfaatan aset daerah seperti pembangunan ruko modern dan gedung parkir terpusat juga akan dioptimalkan. Inovasi pengelolaan retribusi, misalnya integrasi retribusi sampah dengan tagihan PDAM, serta penguatan kinerja BLUD/RSUD, turut menjadi fokus utama.

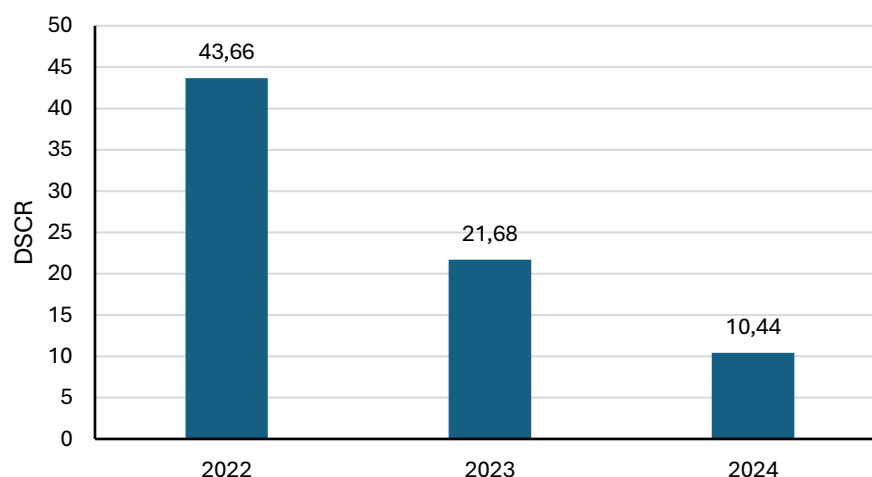
Pada sisi belanja, dominasi belanja rutin yang masih tinggi menekan ruang untuk belanja modal sehingga diperlukan efisiensi belanja pegawai serta penataan ulang belanja barang/jasa. Pemerintah perlu meningkatkan porsi belanja modal yang produktif, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ke depan, kebijakan fiskal diarahkan tidak

hanya untuk menjaga disiplin anggaran dan memenuhi *mandatory spending*, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi ketimpangan desa-kota, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi ruang fiskal juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah dari PT SMI dan Bank NTT yang dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dasar seperti air minum dan infrastruktur pendukung pariwisata, serta pemanfaatan hibah dan CSR secara lebih terstruktur. Selain itu, sinergi dengan pemerintah pusat penting untuk mengakses DAK, bantuan keuangan, dan dukungan untuk program nasional guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah

Kelayakan Pinjaman Daerah

Hasil perhitungan menunjukkan DSCR Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan dari 43,66 pada 2022 menjadi 21,68 pada 2023 dan kembali turun ke 10,44 pada 2024, seiring meningkatnya kewajiban cicilan pinjaman daerah, meskipun begitu seluruh nilai tersebut masih jauh di atas batas aman 2,5 sehingga kapasitas fiskal daerah tetap terjaga bahkan jika pemerintah daerah berencana mengambil pinjaman baru dari pihak ketiga (Gambar 9). Kabupaten Manggarai Barat melakukan pinjaman PEN tahun 2021 senilai hampir Rp247 miliar dengan tenor delapan tahun (jatuh tempo 2028–2030) yang digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang sekitar 300 km menuju 12 kecamatan dalam 18 paket pekerjaan. Namun, berdasarkan hasil IDI dan FGD, pemanfaatan pinjaman tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena cenderung terfokus di wilayah perkotaan dan kurang menjangkau konektivitas desa, sehingga DPRD menekankan perlunya pemerataan alokasi agar manfaat pembangunan infrastruktur jalan lebih dirasakan oleh masyarakat pedesaan.



Gambar 9. DSCR Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

III. Profil Wilayah, Demografi, dan Sosial

Profil Wilayah

Manggarai Barat berada di posisi strategis di ujung barat Pulau Flores dan menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo (Gambar 10). Kedekatannya dengan Laut Flores serta keberadaan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandara Internasional Komodo menjadikannya simpul mobilitas wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), wilayah ini berperan penting dalam pengembangan pariwisata nasional, perdagangan jasa, dan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Peran tersebut semakin kuat berkat investasi infrastruktur pemerintah pusat, termasuk peningkatan kapasitas bandara dan pengembangan konektivitas darat di Labuan Bajo.

Secara lanskap, wilayah Manggarai Barat didominasi oleh topografi berbukit dan bergunung, dengan permukiman yang tersebar dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi di pedalaman. Kondisi geografis ini menciptakan potensi ekonomi yang sangat beragam, mulai dari wisata bahari dan konservasi, pertanian lahan kering, peternakan, hingga perikanan tangkap. Namun, karakter topografi yang terjal juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung, jaringan air minum, dan pelayanan publik yang merata. Aksesibilitas antar kecamatan masih bergantung pada jaringan jalan yang memerlukan peningkatan kualitas, terutama untuk mendukung rantai pasok pertanian dan perikanan yang tersebar di desa-desa terpencil.



Gambar 10. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat
Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2025–2029

Manggarai Barat memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi karena berada di zona rawan gempa, dengan pesisir yang rentan terhadap gelombang tinggi, abrasi, dan potensi tsunami. Topografi berbukit meningkatkan risiko longsor dan banjir bandang, sementara perubahan iklim memicu kekeringan, cuaca ekstrem, dan keterbatasan air bersih. Pertumbuhan pariwisata

yang pesat juga memberi tekanan pada lingkungan melalui meningkatnya kebutuhan air, timbunan sampah, dan degradasi kawasan pesisir. Karena itu, pembangunan daerah memerlukan strategi mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan terpadu, serta penguatan infrastruktur adaptif dan penataan ruang berbasis risiko.

Demografi dan Sosial

Struktur dan dinamika penduduk Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan perkembangan yang relatif stabil (Tabel 4), seiring meningkatnya aktivitas sosial ekonomi yang dipicu oleh pengembangan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pada tahun 2024, jumlah penduduk mencapai sekitar 276,28 ribu jiwa, meningkat dari 265,61 ribu jiwa pada 2022 yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir (1,99 persen per tahun). Konsentrasi penduduk terbesar berada di wilayah sekitar Labuan Bajo dan kecamatan-kecamatan dengan akses jalan utama, sementara kawasan perdesaan di wilayah pegunungan memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah. Pola persebaran penduduk ini mencerminkan perbedaan tingkat aksesibilitas dan peluang ekonomi antar wilayah, terutama antara pusat pertumbuhan dan desa-desa terpencil yang masih bertumpu pada sektor primer.

Dari sisi pendidikan, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Manggarai Barat pada 2023 baru mencapai 8,41 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah capaian nasional yang berada di atas 9 tahun. Namun di sisi lain, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,95 pada 2022 menjadi 68,68 pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan serta meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Manggarai Barat. Peningkatan IPM ini juga diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil serta perluasan kesempatan kerja di sektor jasa dan pariwisata yang mendorong peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan.

Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin menurun dari 17,15 persen pada 2022 menjadi 16,74 persen pada 2024, meskipun secara *absolut* penduduk miskin masih relatif stagnan sekitar 50,68 ribu jiwa. Tren penurunan ini menandakan membaiknya kondisi masyarakat meskipun tantangan kemiskinan struktural di wilayah perdesaan masih cukup besar. *Gini Ratio* juga mengalami fluktuasi namun tetap berada pada rentang 0,306–0,363, yang menandakan ketimpangan pendapatan yang relatif moderat walau belum terselesaikan sepenuhnya. PDRB per kapita juga naik dari Rp14.621,32 juta pada 2022 menjadi Rp16.628,84 juta tahun 2024. Secara umum, Manggarai Barat mengalami kemajuan kondisi sosial ekonomi, dengan terus memperkuat ketahanan demografis untuk menjaga momentum pembangunan.

Tabel 4. Statistik Ekonomi dan Sosial Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2024

Indikator Ekonomi dan Sosial	2022	2023	2024
Penduduk (ribu orang)	265,61	270,92	276,28
Penduduk miskin (ribu orang)	49,95	49,95	50,68
Persentase penduduk miskin (%)	17,15	16,82	16,74
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,95	67,84	68,68
<i>Gini Ratio</i> (indeks)	0,363	0,306	0,324
PDRB per kapita (juta rupiah)	14.621,32	15.710,41	16.628,84

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat (2025), diolah

IV. Kondisi infrastruktur

Dalam beberapa tahun terakhir, ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan akses antar wilayah terutama antara Labuan Bajo sebagai pusat pertumbuhan dan desa-desa terpencil di wilayah pegunungan. Pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung transformasi ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan seiring dengan penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Tabel 5).

Tabel 5. Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat

Infrastruktur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur Dasar (Listrik, Air, Sanitasi)						
Cakupan Listrik (%)	90,00	90,60	91,20	91,79	92,39	92,99
Air Minum Layak (%)	85,60	86,42	87,25	88,07	88,90	89,72
Sanitasi Layak (%)	52,27	58,22	64,17	70,13	76,08	82,03
Sampah Terkelola (%)	60,00	64,50	69,00	73,50	78,00	78,50
Infrastruktur Jalan & Transportasi						
Total panjang jalan (km)	1.226,89	1.273,87	1.320,85	1.367,84	1.414,82	1.461,80
Jalan mantap (%)	43,55	49,38	55,21	61,04	66,87	72,70
Kendaraan (ribu unit)	28.876	31.289	33.703	36.116	38.530	40.943
Jumlah Kapal/Perahu (unit)	205	224	243	262	281	300
Infrastruktur Kesehatan & Pendidikan						
Jumlah RS (unit)	2	2	2	3	3	3
Puskesmas (unit)	21	22	23	24	25	26
SMA (unit)	27	28	28	29	29	30
Ekonomi dan Pariwisata						
Jumlah Rumah Makan (unit)	42	60	78	97	115	133
Jumlah Wisatawan (orang)	103.212	167.606	232.000	296.394	360.788	425.182
Jumlah Perusahaan (unit)	16	17	17	18	18	18
Jumlah Hotel (unit)	97	100	104	107	111	114
Jumlah Rumah Tangga (unit)	57.669	60.220	62.771	65.321	67.872	70.423
Pasar (unit)	15	15	15	15	15	15

Sumber: BPS (2025)

Infrastruktur Dasar: Listrik, Air Minum, dan Persampahan

Akses listrik di Manggarai Barat umumnya telah menjangkau hampir seluruh rumah tangga di kawasan perkotaan dan sebagian besar desa pesisir. Namun, desa-desa di wilayah perbukitan masih menghadapi ketergantungan pada jaringan listrik yang tidak stabil, terutama pada musim hujan. Kesenjangan ini berhubungan erat dengan topografi berbukit dan sebaran permukiman yang berjauhan.

Sektor air minum menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kapasitas jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan kota Labuan Bajo yang mengalami pertumbuhan pesat akibat peningkatan kunjungan wisata. Di beberapa desa, rumah tangga masih mengandalkan sumber air permukaan atau sumur tradisional, yang rentan menurun debitnya pada musim kemarau. Upaya penguatan PDAM terus dilakukan, termasuk rencana penyertaan modal daerah yang memerlukan pembahasan

perda sebagai dasar hukum penguatan kapasitas layanan. Kualitas air di Manggarai Barat relatif masih rendah dengan IKA 51,69 termasuk pada kategori “kurang”.

Sanitasi layak dan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan seiring pesatnya pertumbuhan pariwisata dan peningkatan jumlah penduduk. Kapasitas sistem persampahan di Labuan Bajo mengalami tekanan akibat meningkatnya produksi sampah rumah tangga dan komersial. Beberapa kawasan pesisir dan permukiman padat masih menghadapi masalah keterbatasan fasilitas pengolahan sampah dan minimnya perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya aktivitas wisata, kebutuhan akan TPA dan TPST berstandar modern menjadi semakin mendesak agar tidak menimbulkan tekanan ekologis pada kawasan pesisir dan konservasi.

Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Kondisi geografis Manggarai Barat yang didominasi perbukitan dan kontur yang curam menjadikan penyediaan jaringan jalan sebagai salah satu tantangan utama pembangunan. Jalan penghubung antar wilayah desa, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil, masih memerlukan peningkatan kualitas agar dapat mendukung rantai pasok pertanian, perikanan, dan kebutuhan logistik masyarakat. Ruas-ruas utama menuju Labuan Bajo mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan (terjadi kenaikan persentase jalan mantap dari 43,55 persen pada 2019 menjadi 72,70 persen di tahun 2024), namun jalan-jalan penghubung desa masih menghadapi kerusakan struktural akibat curah hujan tinggi dan pergerakan tanah. Peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari 2019-2024 dengan rata-rata 7,3 persen per tahun belum diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang sepadan (rata-rata pertumbuhan 3,5 persen per tahun).

Dari sisi transportasi, Manggarai Barat memiliki posisi strategis sebagai gerbang wisata utama Nusa Tenggara Timur. Bandara Internasional Komodo menjadi simpul penting pergerakan wisatawan nasional dan internasional, sementara Pelabuhan Labuan Bajo menjadi jalur utama logistik, pelayaran rakyat, dan akses menuju pulau-pulau wisata seperti Komodo, Rinca, dan Padar. Modernisasi pelabuhan dan penataan kawasan *waterfront* telah meningkatkan kualitas layanan wisata maritim, meskipun lonjakan aktivitas kunjungan memunculkan tekanan pada kapasitas dermaga dan keamanan pelayaran.

Transportasi laut antar pulau juga penting untuk perikanan dan distribusi barang kebutuhan pokok. Namun, cuaca ekstrem dan minimnya infrastruktur dermaga di desa-desa kecil sering menghambat kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi nelayan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pelabuhan penumpang dan pelabuhan rakyat, khususnya di kawasan kepulauan dan pesisir yang sangat bergantung pada konektivitas laut.

Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan mengalami perkembangan yang stabil, namun belum sepenuhnya mampu mengikuti tren pertumbuhan penduduk dan kebutuhan layanan

dasar yang meningkat. Jumlah fasilitas pendidikan, terutama sekolah menengah, masih terbatas di beberapa kecamatan sehingga mendorong sebagian pelajar harus berpindah ke wilayah yang lebih terjangkau. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,95 (2022) menjadi 68,68 (2024), capaian ini masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menandakan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dasar dan layanan kesehatan primer di tingkat desa.

Sebagian besar layanan kesehatan masih terpusat di wilayah Labuan Bajo, sedangkan desa-desa perbukitan menghadapi akses yang terbatas, terutama saat kondisi cuaca ekstrem. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk penguatan RSUD dan puskesmas, menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan layanan kesehatan masyarakat.

Infrastruktur Ekonomi dan Pariwisata

Pengembangan pariwisata telah mendorong peningkatan signifikan pada infrastruktur ekonomi di Manggarai Barat. Jumlah hotel, restoran, dan fasilitas wisata meningkat pesat mengikuti lonjakan wisatawan saat pemulihan pasca pandemi. Sektor perdagangan dan jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yang didorong oleh meningkatnya permintaan barang konsumsi dan layanan pariwisata. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PMTB yang naik dari Rp1.608,7 miliar (2022) menjadi Rp1.757,29 miliar (2024), yang mencerminkan ekspansi investasi jangka panjang di sektor properti, konstruksi, dan jasa pariwisata. Di sisi lain jumlah infrastruktur pasar relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan pesat pariwisata juga menimbulkan tekanan pada ekosistem lokal, terutama kawasan pesisir dan pulau-pulau wisata yang memiliki daya dukung terbatas. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pariwisata diarahkan pada pendekatan pariwisata berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah terpadu, pengaturan kapasitas kunjungan, serta peningkatan peran masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata.

Infrastruktur Pemukiman

Kondisi infrastruktur permukiman Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi *backlog* perumahan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan perbaikan signifikan dalam empat tahun terakhir (Tabel 6). Jumlah *backlog* kepemilikan turun dari 8.255 unit (12,76 persen) pada 2020 menjadi 4.152 unit (6,27 persen) pada 2024. Pada kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), terjadi penurunan dari 7.616 unit (13,23 persen) menjadi 3.795 unit (6,64 persen). Perbaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan rumah, perbaikan kondisi ekonomi, serta berbagai program seperti BSPS, subsidi KPR, dan skema pembiayaan perumahan, walaupun dampaknya lebih kuat di sekitar Labuan Bajo dibanding wilayah *hinterland*.

Backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menurun, dari 38.436 unit (59,42 persen) pada 2020 menjadi 33.787 unit (51,00 persen) pada 2024. Pada kelompok MBR, *backlog* RTLH turun dari 36.106 unit (62,74 persen) menjadi 30.686 unit (53,68 persen). Meskipun membaik, angka RTLH yang masih berada di atas 50 persen menunjukkan bahwa kualitas hunian masih menjadi

tantangan utama. Ketinggian biaya logistik, kondisi geografis berbukit dan kepulauan, serta kesenjangan layanan dasar antara Labuan Bajo dan desa-desa terpencil membatasi efektivitas program rehabilitasi rumah.

Tabel 6. *Backlog* Kepemilikan dan RTLH Kabupaten Manggarai Barat 2020 dan 2024

Tahun	Total				MBR			
	<i>Backlog</i>		Presentase <i>Backlog</i>		<i>Backlog</i>		Presentase <i>Backlog</i>	
	Kepemilikan	RTLH	Kepemilikan	RTLH	Kepemilikan	RTLH	Kepemilikan	RTLH
2020	8255	38436	12,76%	59,42%	7616	36106	13,23%	62,74%
2024	4152	33787	6,27%	51,00%	3795	30686	6,64%	53,68%

Sumber: SUSENAS 2020 dan 2024, diolah.

Infrastruktur Ketahanan Bencana

Sebagai wilayah yang berada di jalur cincin api dan dikelilingi perbukitan curam, Manggarai Barat memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Risiko gempa bumi, longsor, banjir bandang, dan gelombang tinggi menjadi tantangan yang harus ditangani melalui infrastruktur ketahanan bencana yang lebih adaptif. Kawasan wisata di pulau-pulau kecil juga rentan terhadap perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem.

Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi di Labuan Bajo turut memperberat beban pengelolaan lingkungan, terutama terkait air bersih dan sampah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan perlu menekankan konservasi sumber air, penguatan infrastruktur sanitasi, dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Manggarai Barat.

Analisis Elastisitas

Hasil analisis elastisitas menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat (Tabel 7). Analisis Elastisitas sendiri adalah ukuran sensitivitas perubahan suatu variabel terhadap variabel lain dalam rentang waktu tertentu, misalnya seberapa besar perubahan PDRB ketika indikator infrastruktur meningkat satu persen. Nilai positif menunjukkan asosiasi positif (semakin tinggi infrastruktur, semakin tinggi PDRB), sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan sebaliknya seperti pada kemiskinan.

Pada kelompok infrastruktur dasar, sanitasi layak memiliki pengaruh paling kuat dengan elastisitas 2,83 terhadap PDRB dan -0,35 terhadap kemiskinan, sehingga menunjukkan bahwa akses sanitasi tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga berkorelasi dengan peningkatan produktivitas dan penurunan kemiskinan. Cakupan air minum layak dan listrik juga memiliki hubungan positif terhadap PDRB serta PAD, sekaligus berkorelasi negatif terhadap kemiskinan, walaupun dengan dampak yang lebih kecil. Pengelolaan sampah memiliki elastisitas cukup tinggi (1,71 terhadap PDRB dan -0,21 terhadap kemiskinan), menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi lokal seperti daur ulang dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel 7. Elastisitas Busur Hubungan Infrastruktur dengan PDRB, PAD, dan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat

Infrastruktur	PDRB	PAD	Kemiskinan
Infrastruktur Dasar (Listrik, Air, Sanitasi)			
Cakupan Listrik (%)	0,21	0,09	-0,03
Air Minum Layak (%)	0,30	0,13	-0,04
Sanitasi Layak (%)	2,83	1,25	-0,35
Sampah Terkelola	1,71	0,75	-0,21
Infrastruktur Jalan & Transportasi			
Total panjang jalan (km)	1,12	0,49	-0,14
Jalan mantap	3,20	1,41	-0,39
Kendaraan (ribu unit)	2,21	0,97	-0,27
Jumlah Kapal/Perahu (unit)	2,40	1,06	-0,30
Infrastruktur Kesehatan & Pendidikan			
Jumlah RS (unit)	2,55	1,13	-0,31
Puskesmas (unit)	1,36	0,60	-0,17
SMA (unit)	0,67	0,30	-0,08
Ekonomi dan Pariwisata			
Jumlah Rumah Makan (unit)	6,64	2,93	-0,82
Jumlah Wisatawan (orang)	7,78	3,44	-0,96
Jumlah Perusahaan (unit)	0,75	0,33	-0,09
Jumlah Hotel (unit)	1,03	0,45	-0,13
Jumlah Rumah Tangga (unit)	1,27	0,56	-0,16
Pasar (unit)	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data olahan InterCAFE (2025)

Pada kelompok jalan dan transportasi, jalan mantap menjadi indikator dengan efek terbesar, yaitu elastisitas 3,20 terhadap PDRB dan -0,39 terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas jalan lebih penting dibanding panjang jalan total, yang meskipun berpengaruh, memiliki elastisitas lebih rendah. Jumlah kendaraan dan jumlah kapal/perahu juga memiliki elastisitas tinggi (masing-masing 2,21 dan 2,40 terhadap PDRB), menunjukkan bahwa peningkatan moda transportasi darat dan laut berkaitan erat dengan meningkatnya mobilitas, perdagangan, dan akses masyarakat terhadap pasar. Dampaknya terhadap penurunan kemiskinan juga cukup signifikan.

Pada kelompok infrastruktur kesehatan dan pendidikan, rumah sakit memiliki elastisitas tertinggi (2,55 terhadap PDRB dan -0,31 terhadap kemiskinan), menandakan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan berkualitas memiliki hubungan kuat dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Puskesmas dan SMA juga menunjukkan pengaruh positif, meskipun relatif lebih kecil dibanding RS.

Sementara itu, kelompok ekonomi dan pariwisata menjadi pendorong paling kuat bagi kinerja ekonomi daerah. Jumlah wisatawan memiliki elastisitas tertinggi di seluruh tabel (7,78 terhadap PDRB dan -0,96 terhadap kemiskinan), menunjukkan peran strategis sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah rumah makan juga menunjukkan pengaruh besar (6,64 terhadap PDRB dan -0,82 terhadap kemiskinan), menandakan efek pengganda tinggi dari sektor kuliner terhadap aktivitas ekonomi. Indikator lain seperti jumlah hotel, perusahaan, dan rumah tangga juga menunjukkan hubungan positif terhadap PDRB dan PAD, meskipun dengan intensitas lebih rendah. Sementara itu, fasilitas pasar tidak menunjukkan pengaruh karena tidak mengalami perubahan pada periode analisis.

V. Dinamika Politik dan Tata Kelola Pemerintah

Arah pembangunan

Visi pembangunan Manggarai Barat berorientasi pada penguatan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama antara Labuan Bajo dan desa-desa pegunungan. Arah kebijakan daerah selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan transformasi ekonomi wilayah timur Indonesia, pembangunan manusia, dan penguatan konektivitas. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memusatkan arah pembangunan pada empat prioritas utama berikut:

1. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis keberlanjutan

Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat memiliki peran nasional dalam pengembangan pariwisata kelas dunia. Namun, perkembangan pariwisata yang pesat juga membawa tekanan signifikan terhadap lingkungan, infrastruktur dasar, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, arah pembangunan diarahkan pada:

- penguatan destinasi dan daya tarik wisata berbasis konservasi dan budaya,
- pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang mengatur daya dukung kawasan,
- peningkatan infrastruktur dasar pendukung pariwisata seperti air minum, sanitasi, SPAM/PDAM, dan pengelolaan sampah,
- pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM lokal sebagai pemasok utama rantai nilai pariwisata,
- perluasan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan sektor jasa.

Pendekatan ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor penyediaan akomodasi, restoran, perdagangan, dan transportasi terhadap PDRB daerah, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

2. Pemerataan pembangunan serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan wilayah pedesaan

Meski pariwisata berkembang pesat, ketergantungan ekonomi yang terlalu kuat pada sektor jasa membuat Manggarai Barat rentan terhadap guncangan eksternal. Sementara itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masih menjadi kontributor utama PDRB terutama sebagai penopang bagi masyarakat di wilayah perdesaan dan pegunungan. Arah pembangunan diarahkan pada:

- peningkatan produktivitas pertanian lahan kering melalui teknologi irigasi sederhana, akses bibit unggul, dan peningkatan akses pasar,
- hilirisasi perikanan dan penguatan rantai dingin (*cold chain*),
- pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perikanan berskala desa,
- penguatan infrastruktur jalan desa untuk membuka isolasi wilayah pegunungan,
- peningkatan kapasitas kelompok tani, nelayan, dan perempuan dalam usaha rumah tangga produktif.

Arah ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan spasial antara Labuan Bajo dan kecamatan-kecamatan terpencil serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

3. Peningkatan layanan dasar: air minum, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan

Tekanan pertumbuhan penduduk dan lonjakan aktivitas wisata mendorong kebutuhan percepatan peningkatan layanan dasar. Tantangan utama terletak pada kapasitas SPAM/PDAM, keterbatasan air baku di musim kemarau, tekanan sanitasi dan sampah, serta keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil. Arah pembangunan diarahkan pada:

- percepatan peningkatan kapasitas PDAM dan pembangunan jaringan SPAM baru,
- penguatan sanitasi dan pengelolaan sampah terpadu yang memenuhi standar kawasan wisata,
- peningkatan kapasitas puskesmas dan layanan kesehatan primer,
- pemerataan fasilitas pendidikan menengah di kecamatan yang masih kurang,
- penyediaan layanan dasar digital untuk meningkatkan akses pendidikan dan konsultasi kesehatan.

4. Transformasi fiskal, pembiayaan alternatif, dan tata kelola pemerintahan modern

Ruang fiskal Manggarai Barat masih terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur meningkat pesat seiring status DPSP. Oleh karena itu, transformasi fiskal dan tata kelola menjadi prasyarat utama. Arah pembangunan diarahkan pada:

- peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi berbasis digital, khususnya dari sektor pariwisata dan jasa,
- penataan struktur belanja agar lebih produktif, mengurangi belanja rutin yang tidak esensial,
- pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti DAK tematik, KPBU wisata–transportasi, serta pinjaman daerah berbasis proyek untuk SPAM, jaringan jalan, atau pengolahan sampah,
- percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
- transparansi perencanaan–penganggaran serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Transformasi fiskal dan tata kelola ini diperlukan untuk mendukung investasi jangka panjang dan menjaga stabilitas pembangunan.

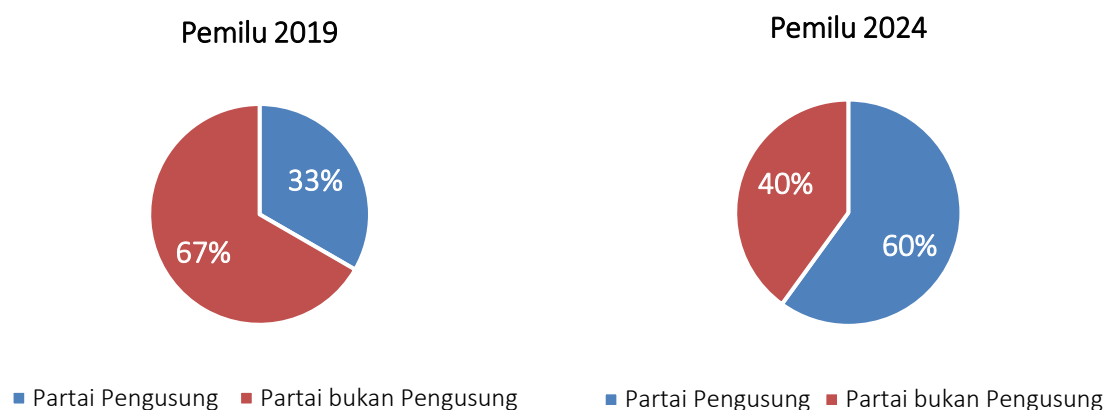
Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat diarahkan untuk memperkuat fondasi layanan dasar, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata sebagai sektor utama daerah. Fokus kebijakan meliputi peningkatan kapasitas SPAM/PDAM, perluasan akses sanitasi, penguatan jaringan jalan desa, penataan pengelolaan sampah terpadu, dan pemerataan pelayanan pendidikan serta kesehatan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan berbasis desa, peningkatan produktivitas UMKM, dan penguatan ekonomi kreatif agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di Labuan Bajo. Transformasi tata kelola dan fiskal dilakukan lewat digitalisasi layanan publik, optimalisasi PAD

sektor pariwisata, penataan belanja yang lebih produktif, serta pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti DAK tematik, KPBU, dan pinjaman daerah untuk infrastruktur prioritas.

Secara bertahap, periode 2026–2030 diarahkan untuk membangun Manggarai Barat yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Tahun 2026 menjadi fondasi awal dengan fokus pada penyediaan layanan dasar dan penguatan infrastruktur desa, diikuti 2027 yang menekankan pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Tahun 2028 diarahkan pada akselerasi integrasi rantai nilai pertanian–perikanan dan hilirisasi, sementara tahun 2029 menjadi fase inovasi melalui percepatan digitalisasi dan penguatan ekonomi kreatif. Pada 2030, pembangunan memasuki tahap konsolidasi dengan penekanan pada infrastruktur hijau, tata kelola transparan, dan penguatan pariwisata berkelanjutan sebagai pilar utama daya saing daerah. Dengan pendekatan bertahap ini, Manggarai Barat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika Politik dan Tata Kelola

Konstelasi politik di Kabupaten Manggarai Barat dalam dua periode pemilu terakhir menunjukkan pola dukungan yang relatif kuat dan stabil terhadap kepala daerah. Pada Pemilu 2019 maupun 2024, koalisi partai pengusung bupati tetap mampu mempertahankan basis dukungan mayoritas di DPRD. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, partai-partai pengusung kepala daerah menguasai sekitar 60 persen kursi DPRD, terdiri dari Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan partai pengusung lainnya, sehingga menempatkan pemerintah daerah dalam posisi politik yang relatif aman dan stabil untuk merumuskan agenda pembangunan daerah (Gambar 11). Komposisi ini menandakan bahwa kepala daerah memiliki dukungan dari lembaga legislatif yang cukup untuk mendorong program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan perluasan layanan dasar. Akan tetapi, bupati tetap perlu membangun komunikasi strategis dengan fraksi-fraksi non-pengusung seperti Gerindra, Demokrat, atau PDIP untuk menjaga stabilitas dalam pembahasan APBD, legislasi, dan keputusan strategis lain yang memerlukan dukungan lintas fraksi.



Gambar 11. Komposisi Partai Pengusung dan Partai bukan Pengusung Kepala Daerah di DPRD Manggarai Barat Pemilu 2019 dan 2024

Hubungan eksekutif legislatif di Manggarai Barat cukup harmonis, dengan DPRD aktif melakukan pengawasan namun tetap mendukung program strategis. Sementara koordinasi perencanaan antara Bappeda, BKAD, dan komisi DPRD berjalan kondusif meski masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat yang terlihat pada pengelolaan Taman Nasional Komodo dan dermaga hotel yang memicu tarik-menarik kepentingan fiskal karena Pemda tidak memiliki kewenangan memungut tarif kunjungan wisata. Keberadaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang membuat sebagian retribusi strategis mengalir ke pusat sehingga mempersempit ruang fiskal daerah; selain itu, penyertaan modal kepada BUMD seperti PDAM membutuhkan dasar hukum berupa perda yang memerlukan pembahasan politik intensif. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun hubungan antar-lembaga relatif harmonis, dinamika pembangunan daerah tetap memerlukan kompromi serta negosiasi politik untuk mencapai kesepakatan kebijakan. Dalam konteks kebijakan pembiayaan infrastruktur, bupati dan DPRD Manggarai Barat memiliki persepsi yang bersifat mendukung pembiayaan kreatif, tetapi menekankan transparansi, disiplin fiskal, serta pemerataan manfaat agar pinjaman daerah tidak hanya terfokus di Labuan Bajo, melainkan juga menjangkau desa-desa. Temuan IDI menunjukkan bahwa DPRD menekankan perlunya analisis manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*) untuk memastikan bahwa setiap penarikan utang tidak sekadar menambah beban APBD, melainkan menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang sepadan. Dari sisi BKAD, Kepala BKAD menekankan prinsip kehati-hatian dalam pinjaman kreatif, pinjaman boleh diambil selama sesuai kemampuan bayar dan memberi manfaat ekonomi langsung. BKAD juga menekankan perlunya diversifikasi pembiayaan melalui PAD, CSR, atau BUMD. Sementara itu, Hasil IDI menunjukkan bahwa Bappeda menilai setiap keputusan pembiayaan harus berbasis data dan sinkron dengan RPJMD, serta ditopang oleh sistem informasi terpadu. Bappeda memandang pinjaman kreatif dapat menjadi instrumen penting.

Prospek pembiayaan Manggarai Barat dalam lima tahun ke depan juga dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat. Dengan PAD yang masih terbatas, adanya kebijakan pengurangan TKD dari pusat di 2026, dan struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa, ruang fiskal untuk belanja modal relatif sempit sehingga proyek-proyek besar seperti SPAM skala kota, pengolahan sampah terpadu, atau revitalisasi pelabuhan wisata masih memerlukan dukungan pembiayaan alternatif. Selain pinjaman daerah, skema KPBU berpotensi menjadi alternatif pembiayaan untuk sektor pariwisata, perumahan, dan persampahan, namun kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan dukungan kelayakan (VGF) dan jaminan proyek masih terbatas. Pemerintah daerah karenanya lebih menekankan insentif non-fiskal seperti penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan, serta kerja sama operasional dengan pelaku usaha wisata.

Dari sisi tata kelola fiskal, Manggarai Barat menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal karena tingginya ketergantungan pada TKDD dan besarnya porsi belanja wajib, sehingga ruang untuk belanja modal menyempit. Meskipun konsistensi perencanaan antar OPD membaik, koordinasi implementasi proyek fisik, terutama soal prioritas dan kesiapan dokumen masih menjadi

tantangan. Sebagai DPSP, pembangunan infrastruktur utama banyak didominasi pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah berperan terutama sebagai fasilitator dan pelaksana pendukung.

Relasi aktor kebijakan di Manggarai Barat tersusun secara jelas: pemerintah pusat menggerakkan proyek strategis dan transfer fiskal; pemerintah provinsi memperkuat konektivitas dan pembinaan; Bupati mengarahkan pembangunan pariwisata berkelanjutan; DPRD menetapkan anggaran dan mengawasi kebijakan; sementara Bappeda dan BKAD memastikan konsistensi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan. Tata kelola daerah menuju pola yang lebih profesional, namun penguatan digitalisasi, integrasi data, dan koordinasi antar-OPD tetap menjadi agenda penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ke depan, perubahan politik nasional termasuk potensi pengurangan TKDD, dapat mempersempit ruang fiskal daerah dan menuntut komunikasi politik yang lebih intensif agar penyesuaian tidak menimbulkan resistensi sosial.

VI. Rekomendasi Kebijakan, Infrastruktur, dan Program Prioritas

Ringkasan Potensi Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang wisata utama Nusa Tenggara Timur dan pusat akses menuju Taman Nasional Komodo, salah satu destinasi unggulan Indonesia. Lokasinya yang didukung oleh Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandara Komodo menjadikan Manggarai Barat simpul penting mobilitas wisatawan, logistik, dan perdagangan antar wilayah di kawasan timur Indonesia. Penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas memperkuat daya tarik investasi pada sektor akomodasi, restoran, properti wisata, transportasi laut, serta jasa pendukung pariwisata. Hasil IDI dan FGD mendukung arah kebijakan ini, di mana potensi unggulan seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Pink, dan Pulau Padar dinilai memiliki daya tarik internasional, sementara pengembangan ekowisata desa menjadi sarana penting untuk pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pembangunan kawasan *waterfront city*, peningkatan kapasitas bandara, serta modernisasi pelabuhan menjadikan Manggarai Barat salah satu pusat pertumbuhan baru yang memiliki potensi pengganda tinggi bagi ekonomi lokal. Untuk memastikan manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota, integrasi pariwisata dengan desa wisata, kuliner lokal, kerajinan, dan ekowisata perlu diperkuat.

Selain pariwisata, Manggarai Barat memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal yang signifikan. Sektor pertanian dan perikanan masih menjadi penopang utama masyarakat perdesaan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Komoditas seperti kemiri, kelapa, kopi, jagung, ternak sapi, serta perikanan tangkap berpotensi dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi sederhana berbasis desa. Hasil FGD menegaskan adanya ketimpangan antara kebutuhan pariwisata dan pasokan lokal, di mana hanya sekitar 20 persen kebutuhan sayuran dapat dipenuhi dari dalam daerah, sisanya masih dipasok dari luar. Hal ini sejalan dengan isu strategis dalam RPJMD yang menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal agar sektor primer dapat berkontribusi lebih besar terhadap pariwisata maupun kemandirian pangan. Upaya pengembangan sektor ini diarahkan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan jalan produksi, penyediaan bibit unggul, distribusi pupuk, serta pelatihan bagi UMKM agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat masuk ke pasar wisata dan memperkuat daya saing daerah.

Pada sektor pertambangan, terdapat potensi mineral seperti mangan dan indikasi emas yang jika dikelola legal dan berkelanjutan dapat menambah sumber pertumbuhan ekonomi. Dari aspek sosial, dominasi penduduk usia produktif dan meningkatnya IPM dari 66,95 (2022) menjadi 68,68 (2024) menunjukkan peluang besar peningkatan kapasitas tenaga kerja. Manggarai Barat juga memiliki potensi energi terbarukan, khususnya panas bumi dengan kapasitas hingga 910 MWe, yang dapat dikembangkan untuk mendukung transisi energi bersih. Sektor perikanan tangkap dan budidaya laut juga memiliki ruang besar untuk tumbuh dengan pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan limbah terpadu, konservasi

pesisir, serta pemanfaatan energi hijau, pembangunan di Manggarai Barat dapat menarik pembiayaan hijau dan investasi berkelanjutan yang kini semakin diminati di tingkat global.

Dari sisi sosial-politik, Manggarai Barat memiliki modal sosial yang kuat dengan keragaman budaya dan agama yang terkelola baik. Tingginya tingkat toleransi dan kohesi sosial memperkuat iklim investasi, sekaligus meminimalkan risiko konflik sosial. Stabilitas ini menjadi aset penting untuk menarik investasi jangka panjang di sektor pariwisata, pertanian, infrastruktur, maupun industri kreatif. Dengan masyarakat yang adaptif dan terbuka terhadap perkembangan baru, peluang kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal semakin terbuka lebar.

Ringkasan Tantangan Kabupaten Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks akibat karakteristik geografis yang berbukit, ketimpangan spasial antara Labuan Bajo dan desa terpencil, serta tekanan infrastruktur dasar seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. Struktur ekonomi masih sangat bergantung pada sektor pariwisata dan perdagangan yang rentan terhadap guncangan eksternal. Sektor pertanian dan perikanan belum memberikan nilai tambah yang optimal karena keterbatasan akses jalan desa, minimnya fasilitas pascapanen, belum tersedianya rantai dingin, dan rendahnya industrialisasi lokal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kontribusi pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan wisatawan maupun masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan jumlah penduduk serta perkembangan pariwisata memberi tekanan besar pada layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Kapasitas SPAM dan PDAM belum mampu memenuhi kebutuhan kawasan wisata yang berkembang pesat, sementara pengelolaan sampah menghadapi kendala kapasitas TPA dan perilaku masyarakat. Kesenjangan ekonomi juga muncul, di mana manfaat pariwisata lebih banyak terpusat di Labuan Bajo, sedangkan desa-desa di *hinterland* belum sepenuhnya menikmati dampak positif.

Di sisi lain, Manggarai Barat juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Kondisi geografis yang didominasi wilayah pesisir dan perbukitan membuat Manggarai Barat rentan terhadap gempa bumi, kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Setiap tahun, kekeringan mengganggu aktivitas masyarakat serta ketahanan pangan, sementara infrastruktur di kawasan rawan bencana belum sepenuhnya tangguh. Perubahan iklim yang ditandai dengan pola hujan ekstrem juga memperbesar risiko, terutama pada daerah pertanian dan pemukiman padat.

Di bidang sumber daya manusia, meskipun IPM terus menunjukkan peningkatan, tantangan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan masih besar. Beberapa wilayah masih kekurangan fasilitas sekolah, kualitas guru belum merata, dan akses pendidikan vokasi terbatas. Pada sektor kesehatan, angka *stunting* masih relatif tinggi, sementara kualitas pelayanan dasar di puskesmas dan desa wisata belum seragam. Dari hasil IDI dan FGD terungkap bahwa keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya di bidang pariwisata, masih

terbatas pada pekerjaan berupah rendah, sementara posisi manajerial banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.

Dari sisi fiskal, ketergantungan Manggarai Barat terhadap Transfer ke Daerah (TKDD) masih sangat tinggi, sementara PAD relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal karena banyak aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya masuk ke basis pajak daerah. Struktur belanja juga masih didominasi belanja wajib dan operasional, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal terbatas.

Di sektor pertambangan, aktivitas ilegal menimbulkan risiko ekologis dan sosial. Selain itu, sebagian aset strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan konservasi berada dalam kewenangan pusat sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya menjadi PAD daerah, tetapi beban lingkungan ditanggung pemerintah kabupaten.

Kebijakan, Infrastruktur, dan Program Prioritas

Berdasarkan hasil analisis ekonomi, sosial, politik, serta potensi dan tantangan daerah, para pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD, Bappeda, BKAD, OPD teknis, akademisi, asosiasi, perwakilan Kementerian Keuangan daerah, dan *regional expert* telah mengidentifikasi sejumlah kebijakan prioritas dalam rangka percepatan pencapaian visi pembangunan daerah 2025–2029.

Kebijakan Prioritas Kabupaten Manggarai Barat

1. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas** - Difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, sanitasi, persampahan serta infrastruktur digital untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas antar-kecamatan dan antar-pulau. Infrastruktur berkualitas juga menjadi prasyarat dalam mendorong investasi swasta dan pelayanan publik yang merata.
2. **Transformasi Pertanian dan Perikanan Maju** - Diarahkan pada pengembangan pertanian dan perikanan yang lebih produktif, modern, dan berorientasi pasar. Kebijakan ini mencakup penguatan rantai nilai hasil pertanian dan perikanan, penyediaan sarana prasarana produksi, pengolahan pascapanen, serta integrasi dengan sektor pariwisata melalui konsep *agro tourism* dan *eco-fisheries*.
3. **Peningkatan Kualitas SDM Unggul dan Kompetitif** - Berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan, penguatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata, pertanian, dan jasa. Kebijakan ini bertujuan mencetak SDM lokal yang mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta mengurangi ketimpangan kualitas hidup antarwilayah.
4. **Penguatan Daya Saing Pariwisata Unggul** - Diarahkan pada optimalisasi potensi Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dengan memperkuat infrastruktur pendukung, layanan pariwisata berbasis masyarakat, promosi digital, dan pengembangan destinasi

alternatif di luar Labuan Bajo. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan wisata dan menciptakan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

5. **Reformasi Birokrasi yang Proporsional dan Profesional** - Difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui digitalisasi, transparansi tata kelola, dan penguatan sistem pengawasan. Reformasi birokrasi ditujukan untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kredibilitas pemerintahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah.

Untuk mendukung kebijakan di atas, para pemangku kepentingan menyusun sejumlah program prioritas yang lebih operasional dan berorientasi pada capaian konkret mengacu pada hasil FGD, IDI, dan analisis teknokratik. Program yang disusun dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu Infrastruktur Prioritas dan Program Prioritas.

Infrastruktur Prioritas lebih menekankan pada pembangunan fisik dan penyediaan sarana pendukung ekonomi, sosial, serta lingkungan. Berikut daftar infrastruktur prioritas yang telah disusun:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan
2. Pembangunan Infrastruktur untuk Penyediaan Air Minum
3. Peningkatan Program Sanitasi dan Air Bersih
4. Pembangunan TPST/TPS 3R
5. Pembangunan Lahan/Gedung Parkir
6. Pembangunan Pelabuhan Domestik untuk Kapal-Kapal Wisata (Khususnya Kapal Pinisi dan *Speedboat*)
7. Pembangunan Pasar Rakyat
8. Revitalisasi Aset-Aset Daerah
9. Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong produksi, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menilai besarnya dampak tersebut, analisis *multiplier* sektoral digunakan sebagai pendekatan utama dalam mengukur efek langsung, tidak langsung, dan lanjutan dari proyek infrastruktur maupun program kebijakan terhadap perekonomian yang lebih luas, sekaligus membantu perumusan kebijakan dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi dampak terbesar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan saling terkait antar sektor. Pembangunan pasar rakyat memiliki *multiplier* 1,33 pada sektor konstruksi, sementara pembangunan infrastruktur air minum dan rehabilitasi irigasi pertanian tidak hanya berdampak langsung pada konstruksi, tetapi juga mendorong sektor pengadaan air dan pertanian tanaman pangan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan output sektor utama, tetapi juga menciptakan efek berantai yang lebih luas, sehingga perencanaan

infrastruktur perlu mempertimbangkan potensi *multiplier* untuk memaksimalkan manfaat ekonomi jangka panjang (Tabel 8).

Tabel 8. Identifikasi Usulan Proyek infrastruktur dengan Nilai *Multiplier* Kabupaten Manggarai Barat

No	Usulan Proyek	Sektor yang akan Terdampak Secara Langsung	Sektor yang akan Terdampak Secara Tidak Langsung
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan/Jembatan	Konstruksi (1,33)	Angkutan darat (1,26)
2	Pembangunan Infrastruktur untuk Penyediaan Air Minum	Konstruksi (1,33)	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (1,40)
3	Peningkatan Program Sanitasi dan Air Bersih	Konstruksi (1,33)	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (1,40) Real estate (1,15)
4	Pembangunan TPST/TPS 3R	Konstruksi (1,33)	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (1,40)
5	Pembangunan Lahan/Gedung Parkir	Konstruksi (1,33)	Jasa lainnya (1,31)
6	Pembangunan Pelabuhan Domestik untuk Kapal-Kapal Wisata (Khususnya Kapal Pinisi dan <i>Speedboat</i>)	Konstruksi (1,33)	Angkutan laut (1,33)
7	Pembangunan Pasar Rakyat	Konstruksi (1,33)	Perdagangan besar dan cceran, bukan mobil dan sepeda motor (1,32)
8	Revitalisasi Aset-Aset Daerah	Konstruksi (1,33)	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian	Konstruksi (1,33)	Pertanian tanaman pangan (1,16) Pertanian tanaman hortikultura semusim, hortikultura tahunan, dan lainnya (1,15)

Sumber: Data olahan InterCAFE (2025)

Sementara itu, Program Prioritas mencakup aspek kebijakan, tata kelola, kelembagaan, serta penguatan kapasitas yang berfungsi menunjang keberlanjutan pembangunan. Pemisahan ini dilakukan agar arah kebijakan lebih terstruktur, memudahkan pengambilan keputusan, dan memastikan fokus antara pembangunan fisik dan reformasi kelembagaan tetap berjalan seimbang. Adapun daftar program prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas ASN di Sektor Layanan Dasar
2. Pendampingan Teknis Penguatan Pengelolaan Fiskal Daerah
3. Pengembangan UMKM Penunjang Wisata
4. Kerja sama/Pemanfaatan KPBU, Pinjaman Daerah, Pembiayaan BUMD untuk Infrastruktur

5. Dana Insentif Fiskal Berbasis Peningkatan PAD
6. Digitalisasi Pelayanan Publik
7. Harmonisasi Daerah dengan Kebijakan Nasional
8. Kerja sama Kemitraan dengan BUMN Infrastruktur
9. Pembuatan Dashboard/Integrasi Pemetaan Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Data

Potensi dampak ekonomi juga terlihat pada level program, di mana penguatan kapasitas ASN di sektor layanan dasar memiliki *multiplier* 1,34 pada sektor administrasi pemerintahan, mencerminkan perannya dalam meningkatkan kualitas dan keadilan layanan publik (Tabel 9). Sementara itu, digitalisasi pelayanan publik mendorong sektor jasa informasi dan komunikasi dengan *multiplier* 1,27 serta memperkuat kinerja sektor pemerintahan. Secara keseluruhan, program-program di Kabupaten Manggarai Barat berperan sebagai penggerak pertumbuhan sekaligus menciptakan efek ekonomi berantai lintas sektor.

Tabel 9. Identifikasi Usulan Program dengan Nilai *Multiplier* Kabupaten Manggarai Barat

No	Usulan Program	Sektor yang akan Terdampak Secara Tidak Langsung
1	Penguatan Kapasitas ASN Di Sektor Layanan Dasar	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34) Jasa pendidikan (1,24)
2	Pendampingan Teknis Penguatan Pengelolaan Fiskal Daerah	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)
3	Kerjasama/Pemanfaatan KPBU, Pinjaman Daerah, Pembiayaan BUMD untuk Infrastruktur	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34) Konstruksi (1,33)
4	Dana Insentif Fiskal Berbasis Peningkatan PAD	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)
5	Harmonisasi Daerah dengan Kebijakan Nasional	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)
6	Digitalisasi Pelayanan Publik	Jasa informasi dan komunikasi (1,27) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)
7	Pengembangan UMKM Penunjang Wisata	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (1,32)
8	Kerjasama Kemitraan dengan BUMN Infrastruktur	Konstruksi (1,33) Jasa perusahaan (1,33)
9	Pembuatan <i>Dashboard</i> /Integrasi Pemetaan Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Data	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,34)

Sumber: Data olahan InterCAFE (2025)

VII. Rekomendasi

Berdasarkan hasil *Kajian Regional Diagnostic* Kabupaten Manggarai Barat, berikut beberapa rekomendasi strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sesuai RPJMD 2025–2029:

1. Percepatan Infrastruktur Layanan Dasar dan Konektivitas Wilayah

Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses terhadap air minum yang layak, sanitasi, pengelolaan sampah, serta layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Infrastruktur jalan dan konektivitas antar wilayah juga harus diprioritaskan untuk membuka akses kawasan produksi menuju pasar dan destinasi pariwisata. Pembangunan ini sebaiknya berbasis pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pesisir, mendapat akses layanan publik yang memadai. Skema pembiayaan dapat menggunakan kombinasi APBD/APBN, pinjaman daerah, hingga KPBU untuk proyek dengan arus kas jelas seperti pengelolaan air minum dan sanitasi.

2. Transformasi Pertanian dan Perikanan yang Modern dan Terintegrasi dengan Pariwisata

Sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi perlu direvitalisasi melalui modernisasi teknologi, penguatan rantai pasok, dan integrasi dengan kebutuhan pariwisata. Produk hortikultura, perikanan tangkap maupun budidaya dapat diarahkan untuk memasok hotel, restoran, dan kapal wisata. Dukungan infrastruktur seperti *cold storage*, *mini processing*, dan fasilitas logistik terpadu harus dibangun agar nilai tambah tetap dinikmati oleh pelaku lokal. Transformasi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada pariwisata, serta menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata.

3. Penguatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo perlu didukung dengan strategi pengembangan yang memperdalam rantai nilai pariwisata. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas layanan akomodasi, restoran, perdagangan, serta jasa penunjang lainnya melalui sertifikasi standar, digitalisasi tiket dan retribusi, serta promosi *event* unggulan. Dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif, seperti kuliner lokal, kriya, dan produk budaya, juga harus diperluas agar manfaat pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku besar tetapi juga dirasakan masyarakat desa dan pelaku usaha mikro.

4. Peningkatan Kualitas SDM dan Inklusi Pasar Kerja

Dominasi usia produktif harus dimanfaatkan melalui peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Program pelatihan vokasi di bidang *hospitality*, logistik, digitalisasi, serta pengelolaan infrastruktur dasar sangat mendesak untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal di sektor pariwisata dan UMKM harus menjadi prioritas agar masyarakat lebih tangguh menghadapi risiko guncangan ekonomi. Investasi pada pendidikan dan kesehatan juga akan berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat.

5. Diversifikasi Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Prospektif

Analisis LQ dan DLQ menunjukkan beberapa sektor seperti konstruksi, *real estate*, industri pengolahan, energi, serta jasa kesehatan memiliki prospek pertumbuhan tinggi dan daya

saing progresif. Pemerintah perlu mendorong investasi, insentif fiskal, dan penguatan kelembagaan untuk mempercepat berkembangnya sektor-sektor ini. Diversifikasi akan mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada pariwisata, membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang adaptif terhadap dinamika global.

6. Penguatan Kapasitas Fiskal dan Diversifikasi PAD

Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat perlu dikurangi dengan menggali sumber-sumber PAD baru. Pemerintah dapat mengembangkan pajak digital dari sektor pariwisata (*e-ticketing*, retribusi *online*, pajak hotel dan restoran berbasis aplikasi), optimalisasi aset daerah yang belum produktif, serta potensi pajak kendaraan bermotor air. Inovasi digitalisasi retribusi sampah dan integrasi dengan PDAM juga dapat memperluas basis penerimaan. Langkah ini akan memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

7. Peningkatan Porsi Belanja Modal Produktif

Belanja daerah yang masih didominasi belanja rutin harus diarahkan kembali ke belanja modal produktif, minimal 20 persen dari total belanja APBD. Alokasi tersebut idealnya difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (jalan, air, dan sanitasi) yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penganggaran berbasis kinerja, setiap rupiah belanja harus menghasilkan output dan *outcome* yang jelas, baik dalam peningkatan layanan dasar maupun percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Inovasi Pembiayaan dan Disiplin Fiskal

Keterbatasan kapasitas APBD menuntut optimalisasi berbagai instrumen pembiayaan alternatif—mulai dari pinjaman daerah melalui PT SMI, skema KPBU, hibah, hingga CSR terprogram—untuk mendukung percepatan pembangunan. Namun demikian, setiap alternatif pembiayaan harus disertai studi kelayakan dan analisis manfaat biaya yang transparan agar tidak membebani fiskal di masa depan. Disiplin fiskal perlu dijaga dengan mengendalikan belanja pegawai, menjaga rasio DSCR di atas batas aman, serta membangun mekanisme *early warning system* untuk merespons risiko pengurangan transfer pusat.

9. Penguatan Tata Kelola dan Digitalisasi Pemerintahan

Konsistensi antara eksekutif dan legislatif perlu dijaga untuk memastikan persetujuan program strategis berjalan lancar. Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan *dashboard* aksi dan pembiayaan *real-time* perlu dikembangkan agar perencanaan, monitoring, dan evaluasi lebih transparan dan berbasis bukti. Digitalisasi pajak, retribusi, serta layanan publik juga akan meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat akuntabilitas fiskal.

10. Integrasi Pembangunan dengan Agenda Lingkungan dan Tata Ruang

Pembangunan sektor *real estate*, konstruksi, dan utilitas harus diselaraskan dengan daya dukung lingkungan dan peta rawan bencana. Pemerintah perlu menerapkan regulasi ketat terkait tata ruang, kepadatan bangunan, serta kewajiban infrastruktur biru-hijau (ruang

terbuka hijau, drainase ramah lingkungan, dan konservasi ekosistem). Selain itu, pungutan konservasi berbasis wisata dapat menjadi sumber dana berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. 2025. *Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka 2025*. Labuan Bajo: BPS Kabupaten Manggarai Barat.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2024*. Labuan Bajo: BPS Kabupaten Manggarai Barat.
- Bappeda Kabupaten Manggarai Barat. 2024. *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029*. Labuan Bajo: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bappeda Kabupaten Manggarai Barat. 2023. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat*. Labuan Bajo: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- CEIC Data. 2025. *Indonesia Regional Economic and Fiscal Indicators*. CEIC Database.
- Estache, A. 2007. *Infrastructure and Development: A Survey of Recent and Upcoming Issues*. World Bank Policy Research Working Paper. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025. *Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Tahun 2010–2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025. *Statistik Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.